



Analisis Efektivitas Pengelolaan Risiko Bencana Melalui Pendekatan Good Governance Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

Kiki Asrifa Dinen
Universitas Abulyatama; kikiasrifa_fikes@abulyatama.ac.id

Abstract

Nias Selatan Regency is one of the disaster-prone areas in North Sumatra Province, facing recurring threats such as floods, landslides, and high waves. These conditions demand an effective and sustainable disaster risk management system based on the principles of good governance. This study was conducted in the working area of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Nias Selatan Regency and aims to analyze the level of effectiveness in disaster risk management and evaluate the application of good governance principles, including transparency, accountability, participation, effectiveness and efficiency, and responsiveness. The research employed a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The study involved seven informants, consisting of BPBD structural officials, sub-district heads, village heads, and affected community members. The results indicate that disaster risk management by BPBD has not been fully optimal. The implemented programs are not yet evenly distributed, lack sustainability, and use no standardized indicators of success, while public involvement remains limited. The application of good governance principles is also not fully realized, especially in terms of information transparency and public reporting. This research recommends strengthening institutional capacity, utilizing digital information systems, and enhancing coordination and community participation in all stages of disaster risk management

Keywords

Disaster Risk Management, Good Governance, Effectiveness, BPBD, Nias Selatan

1. INTRODUCTION

Bencana alam merupakan ancaman nyata yang terus meningkat seiring dengan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Di berbagai belahan dunia, terutama negara-negara yang memiliki kerentanan tinggi seperti Indonesia, bencana alam sering kali menimbulkan kerugian besar baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun ekologi. Indonesia, yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dan termasuk dalam wilayah Cincin Api Pasifik, merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan hampir setiap tahun terjadi dan menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.



Dalam UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam konteks ini, manajemen risiko bencana menjadi sangat penting dan strategis. Pengelolaan risiko tidak lagi semata berfokus pada upaya tanggap darurat, tetapi harus dimulai sejak tahap prabencana melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dinilai dapat memperkuat efektivitas pengelolaan risiko bencana adalah penerapan prinsip Good Governance. Tata kelola yang baik mendorong pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada hasil dan keadilan. Dalam konteks kebencanaan, prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk meningkatkan kapasitas institusional, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pengurangan risiko bencana.

Pemerintah daerah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memiliki peran vital dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko di wilayahnya masing-masing. Keberhasilan BPBD sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola yang diterapkan. Kelemahan dalam aspek koordinasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dapat berdampak langsung terhadap efektivitas program penanggulangan bencana, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi dan kapasitas sumber daya yang terbatas.

Salah satu wilayah yang memiliki karakteristik kerawanan bencana tinggi adalah Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini tergolong rawan gempa bumi dan tsunami karena lokasinya yang dekat dengan zona subduksi lempeng tektonik. Selain itu, topografi yang berbukit serta kondisi infrastruktur yang belum merata menyebabkan wilayah ini juga rentan terhadap longsor dan banjir di musim hujan. Beberapa kejadian bencana besar di masa lalu menunjukkan bahwa Nias Selatan memerlukan sistem manajemen risiko yang lebih kuat, tangguh, dan inklusif.

Namun, tantangan dalam pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Nias Selatan masih cukup kompleks. Keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi hambatan utama. Selain itu, belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip good governance dalam

kebijakan dan program kebencanaan menyebabkan respons dan mitigasi sering kali tidak tepat sasaran atau kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas pengelolaan risiko bencana di wilayah ini, khususnya melalui pendekatan tata kelola yang baik.

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Nias Selatan telah beberapa kali dilanda bencana alam dengan dampak yang cukup signifikan, yang menegaskan pentingnya sistem pengelolaan risiko yang terstruktur dan berkelanjutan. Pada Maret 2022, gempa bumi berkekuatan 6,7 skala Richter mengguncang wilayah ini, menyebabkan kerusakan bangunan dan kepanikan di tengah masyarakat. Selanjutnya, pada Juni 2024, gempa bumi berkekuatan 5,7 SR kembali mengguncang laut di tenggara Nias Selatan, memperlihatkan konsistensi ancaman seismik di wilayah ini. Selain itu, banjir dan tanah longsor yang terjadi pada April 2024 berdampak pada pemukiman penduduk dan akses infrastruktur, yang mengindikasikan lemahnya sistem peringatan dini dan mitigasi berbasis wilayah rawan.

Penelitian yang sejalan juga pernah dilakukan oleh Rachmawati pada tahun 2019 dengan judul "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Risiko Bencana di Kabupaten Sleman" membahas tentang sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan dalam penanganan bencana erupsi Gunung Merapi. Rachmawati menggunakan teori good governance dari UNDP (2001) yang meliputi partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan utamanya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi pada tahap tanggap darurat, namun masih lemah dalam tahap mitigasi. Selain itu, akuntabilitas lembaga juga masih rendah akibat minimnya dokumentasi dan laporan evaluasi bencana.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada "Analisis Efektivitas Pengelolaan Risiko Bencana Melalui Pendekatan Good Governance di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip good governance telah diintegrasikan dalam sistem pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Nias Selatan, serta bagaimana implementasinya berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program kebencanaan di daerah tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola kebencanaan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu

menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel yang diteliti., dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam pengelolaan risiko bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Selatan, serta bagaimana penerapan tersebut memengaruhi efektivitas manajemen kebencanaan di daerah tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, kebijakan, pola koordinasi, serta persepsi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan good governance dalam pengelolaan risiko bencana.

3. RESULT AND DISCUSS

Efektivitas penerapan Good Governnace Dalam Pengelolaan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Nias Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Nias Selatan [C13.1]sebenarnya sudah memiliki perangkat kelembagaan yang cukup lengkap seperti SOP, rencana kontinjensi, serta Tim Reaksi Cepat (TRC). Program teknis berupa pelatihan, simulasi evakuasi, pemasangan rambu, dan penyediaan logistik di beberapa titik rawan juga telah dilakukan. Namun, jika ditelaah lebih jauh, efektivitas penerapan good governance masih jauh dari optimal, terutama dalam hal partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas di lapangan.

Prinsip good governance sebagaimana dikemukakan UNDP (1997) menekankan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas. Prinsip-prinsip inilah yang seharusnya menjadi pijakan dalam pengelolaan risiko bencana. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar prinsip tersebut belum benar-benar hadir dalam praktik. Dalam hal partisipasi, misalnya, masyarakat masih jarang dilibatkan sejak tahap perencanaan. Seorang warga yang saya temui menyatakan, "Saya belum pernah diajak rapat soal bencana, tapi kalau diajak saya mau ikut, asal waktunya pas dan jelas infonya." Pernyataan ini memperlihatkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk terlibat, tetapi ruang itu tidak pernah benar-benar terbuka. Dari pengalaman saya menghadiri musyawarah desa, terlihat bahwa warga hadir lebih sebagai pendengar pasif. Mereka duduk menyimak arahan perangkat desa tanpa banyak memberikan masukan. Hal ini membuat saya berasumsi bahwa kultur birokrasi yang masih top-down menutup

peluang bagi partisipasi masyarakat yang lebih aktif.

Transparansi juga belum terwujud sepenuhnya. Informasi mengenai distribusi bantuan dan alokasi anggaran tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Pencatatan logistik masih manual, sehingga tidak ada data real time yang bisa diakses masyarakat. Bahkan seorang warga mengeluh, “Belum pernah lihat siapa yang dapat bantuan dan berapa jumlahnya. Kalau bisa dipasang daftar penerima di balai desa, itu lebih baik.” Dari observasi saya di lapangan, benar bahwa sebagian besar informasi hanya beredar melalui cerita dari tetangga atau grup WhatsApp terbatas, bukan melalui mekanisme resmi yang dapat diakses publik. Saya berasumsi bahwa kondisi ini pada akhirnya menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak percaya di kalangan warga, karena transparansi yang seharusnya menjadi pilar good governance justru belum terwujud.

Akuntabilitas juga masih terbatas pada kewajiban administratif. Laporan dibuat secara rutin, tetapi lebih ditujukan kepada atasan di tingkat kabupaten atau provinsi, bukan kepada masyarakat yang terdampak langsung. Seorang warga bahkan mengatakan, “Saya bingung siapa yang harus diminta pertanggungjawaban. Harusnya pemerintah desa dan BPBD saling kerja sama dan lebih terbuka.” Dari interaksi langsung dengan masyarakat, saya melihat bahwa mereka memang tidak tahu ke mana harus mengadukan keluhan ketika bantuan tidak tepat sasaran. Asumsi saya, kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara akuntabilitas formal ke instansi atasan dengan akuntabilitas sosial ke masyarakat.

Dari sisi efektivitas program, pelatihan dan simulasi memang memberi dampak positif, namun tidak berkesinambungan. Kepala desa yang saya wawancarai menyebut, “Program simulasi cukup berdampak, tapi karena hanya dilakukan sekali, efeknya tidak berkelanjutan.” Saya sendiri sempat menyaksikan simulasi evakuasi, di mana warga tampak antusias. Namun beberapa bulan setelahnya, ketika saya kembali mengunjungi desa tersebut, sebagian warga mengaku sudah lupa dengan prosedur evakuasi yang pernah dipraktikkan. Hal ini membuat saya berasumsi bahwa efektivitas program lebih banyak berakhir sebagai pengalaman sesaat, bukan pengetahuan kolektif yang berkelanjutan.

Sementara itu, pada aspek responsivitas, perbedaan yang tajam terlihat antara wilayah perkotaan dengan desa-desa terpencil. Di pusat kecamatan, bantuan bisa datang dalam waktu singkat, bahkan camat menyebut hanya membutuhkan satu hingga dua jam jika akses jalan memadai. Namun di pelosok, bantuan sering

terlambat. Salah seorang warga dengan nada kecewa mengatakan, “BPBD bantu sih, tapi sering telat datang dan bantuannya juga nggak selalu cocok dengan kebutuhan kami.” Saat saya turun langsung ke salah satu desa terdampak banjir, saya menyaksikan bagaimana warga harus melakukan evakuasi sendiri sebelum bantuan resmi tiba. Dari pengalaman ini saya berasumsi bahwa prinsip responsivitas memang sudah ada dalam struktur, tetapi sulit diwujudkan secara merata karena faktor geografis yang berat dan keterbatasan sarana prasarana.

Secara keseluruhan, saya berasumsi bahwa efektivitas penerapan good governance di Kabupaten Nias Selatan masih lebih kuat pada aspek prosedural ketimbang substansial. Program sudah ada, laporan sudah dibuat, tetapi implementasi di lapangan belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara merata. Orientasi program masih condong pada pemenuhan administrasi, bukan perubahan nyata yang dirasakan oleh warga terdampak.

Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Nias Selatan[C14.1]

Penelitian ini juga menemukan adanya faktor pendorong yang dapat memperkuat penerapan good governance. Keberadaan SOP, TRC, dan kerja sama lintas sektor dengan TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan menjadi modal penting. Selain itu, penyediaan logistik di titik rawan bencana membantu mempercepat distribusi saat bencana terjadi. Namun, faktor-faktor pendorong ini belum mampu menutupi berbagai hambatan yang masih dominan, seperti keterbatasan SDM, anggaran, infrastruktur, rendahnya literasi kebencanaan masyarakat, sistem logistik manual, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.

Dwiyanto (2020) menjelaskan bahwa efektivitas good governance sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan publik dan partisipasi masyarakat. Dwiyanto juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan agar pengurangan risiko bencana berkelanjutan. Namun dalam kenyataan di Nias Selatan, partisipasi masyarakat masih bersifat reaktif. Kepala desa yang saya wawancarai berkata, “Warga desa bersedia hadir dalam musyawarah jika diajak, tapi hanya sedikit yang aktif menyumbangkan ide.” Saat menghadiri musrenbang, saya melihat langsung bahwa isu kebencanaan hanya dibicarakan sepintas lalu, bukan sebagai agenda utama. Hal ini membuat saya berasumsi bahwa partisipasi masyarakat tidak pernah benar-benar difungsikan sebagai elemen kunci dalam perencanaan, melainkan hanya sebagai pelengkap formalitas.

Hambatan lain yang sangat dominan adalah medan geografis. Saat saya mengunjungi desa yang akses jalannya terputus akibat longsor, saya mendapati bahwa keterlambatan bantuan tidak sepenuhnya karena kelalaian BPBD, tetapi memang karena kondisi infrastruktur yang berat. Dari situ saya berasumsi bahwa selama jalan dan akses dasar tidak dibenahi, prinsip responsivitas hanya akan berjalan di wilayah tertentu, sementara desa-desa pelosok tetap terpinggirkan.

Sistem logistik manual juga memperparah situasi. Saya melihat sendiri daftar penerima bantuan ditulis di kertas biasa, tanpa mekanisme verifikasi yang jelas. Akibatnya, distribusi tidak merata dan menimbulkan kekecewaan. Salah seorang warga bahkan berkata, "Waktu kami minta bantuan tambahan, katanya habis, dan nggak ada kabar lagi." Dari pengamatan ini, saya berasumsi bahwa sistem manual bukan hanya masalah administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat akibat rasa ketidakadilan.

Kerja sama lintas sektor dengan TNI, Polri, dan Dinkes memang menjadi kekuatan, tetapi saya melihat bahwa koordinasi ini lebih bersifat insidental, muncul ketika ada bencana besar, bukan mekanisme yang rutin dan berkelanjutan. Saya berasumsi bahwa pola koordinasi semacam ini lebih menyerupai pemadam kebakaran, bukan sistem yang kokoh.

Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa faktor pendorong sebenarnya cukup menjanjikan, tetapi faktor penghambat jauh lebih dominan. Hambatan bukan hanya bersifat teknis seperti keterbatasan SDM atau anggaran, melainkan juga kultural, berupa budaya birokrasi top-down, rendahnya partisipasi warga, serta lemahnya tradisi transparansi. Dari pengalaman turun langsung ke lapangan, saya berasumsi bahwa selama hambatan kultural ini tidak diatasi, setiap kemajuan yang dicapai BPBD hanya akan menjadi catatan administratif, bukan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat terdampak bencana

CONCLUSIONS

Penerapan good governance dalam pengelolaan bencana di Kabupaten Nias Selatan belum efektif. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat yang masih rendah dan bersifat reaktif, transparansi informasi logistik dan anggaran yang belum terbuka, akuntabilitas yang lebih bersifat administratif dari pada publik, efektivitas program yang tidak berkelanjutan, serta responsivitas yang tidak merata antara wilayah kota

dan pelosok. Dengan kondisi ini, penerapan prinsip good governance baru sebatas prosedural, sementara implementasi nyata di lapangan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Faktor pendorong penerapan good governance antara lain keberadaan SOP dan TRC, kerja sama lintas sektor, penyediaan logistik di titik rawan, serta kesadaran masyarakat yang pernah terdampak. Namun, faktor penghambat lebih dominan, berupa keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana prasarana, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya literasi kebencanaan, sistem logistik manual, serta koordinasi antarinstansi yang belum sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan good governance di Kabupaten Nias Selatan masih menghadapi kendala struktural maupun kultural, sehingga perlu penguatan kapasitas, transparansi, serta pelibatan masyarakat yang lebih aktif dan berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiansyah. (2018). *Evaluasi Strategi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Baihaki, E., Gusfa, H., & Rahayu, R. G. (2020). Implementation of Pentahelix Synergy in Acceleration of Covid Handling 19. *Pasundan International Of Community Services Journal (PICS-J)*, 2(1), 48–57. <https://doi.org/10.23969/pics.v2i1.2940>
- Dewi, L., & Kurniawan, A. (2021). Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–159.
- Erwin, & Indrizal, E. (2014). TATA KELOLA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM Suatu Deskripsi Inter-Relasi dan Kesiapan Para Pihak dalam rangka Rehabilitasi- Rekonstruksi Rumah Warga Terdampak Pascagempa di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(2), 201–221. <https://doi.org/10.25077/jantro.v16.n2.p201-221.2014>
- Faturahman, B. M. (2017). Reformasi Administrasi Dalam Manajemen Bencana. *Mimbar Yustitia*, 1(2), 185–201. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v1i2.1109>
- Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana Gempabumi. *Jurnal Geodika*, 3(1), 30– 40.

- Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). The Penta Helix Model of Innovation in Oman: An HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12, 159–172. <https://doi.org/10.28945/3735>
- Handayani, R. (2022). Peran Good Governance dalam Penguatan Kapasitas Masyarakat Terdampak Bencana di Lombok Timur. *Jurnal Mitigasi dan Resiliensi*, 5(1), 22–35.
- Hutapea, D. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami di Kabupaten Tapanuli Tengah. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Hui, D. S., Azhar, E. I., Madani, T. A., Ntoui, F., Kock, R., Dar, O., Ippolito, G., Mchugh, T. D., Memish, Z. A., & Drosten, C. (2020). The continuing 2019- nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health — The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. *International Journal of Infectious Diseases*, 91, 264–266. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.01.009>
- Ikasari, A. C. (2018). Tinjauan Model Kerjasama Daerah di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 12(1), 102–122.
- Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T. (2017). The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 412–417.
- Nahar, L. (2016). Studi Deskriptif tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan Lailan Nahar. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 18–26.
- Pratiwi, A. (2020). Analisis Implementasi Good Governance dalam Manajemen Bencana Banjir di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pyles, L. (2007). Community organizing for post-disaster social development: Locating social work. *International Social Work*, 50(3), 321–333. <https://doi.org/10.1177/0020872807076044>
- Ramadhan, I., & Matondang, A. (2016). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 4(2), 176–185. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.455>
- Rachmawati, N. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Risiko Bencana di Kabupaten Sleman. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 4(3), 200–213.

- Rizky, M. A., & Fathurrahman, M. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penyaluran Bantuan Bencana di Kabupaten Bima. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 7(1), 89–103.
- Rochmadditia, A. F. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik. *Publika*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/10.26740/publika.v2n3.p%25p>
- Rozikin, M. (2019). Kolaborasi Antar Stakeholders Penta Helix Dalam Pengembangan Kota Kreatif (Studi di Kota Malang). *PANGRIPTA: Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan*, 2(2), 49–57.
- Simanjuntak, R. (2019). Analisis Kapasitas Lembaga dalam Mitigasi Bencana Longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 6(2), 77–91.
- Siregar, B., & Gurning, A. (2021). Efektivitas Tata Kelola Bencana Alam di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Kebencanaan Indonesia*, 3(1), 40–55.
- Utami, N., & Wibowo, D. (2022). Transparansi Informasi dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Agung di Bali. *Jurnal Komunikasi Krisis dan Bencana*, 2(1), 65–78.
- Warsono, H. (2009). Networking dalam Intergovernmental Management. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 78–91.
- Yusuf, H., & Mulyani, S. (2023). Evaluasi Kinerja BPBD dalam Mitigasi Bencana Melalui Pendekatan Good Governance di Kabupaten Lebak. *Jurnal Manajemen Risiko dan Bencana*, 8(2), 101–117.
- Yudho, W., P., & Ulum M., C. (2011). Manajemen Bencana dan Governance Mind Set. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1).
- Yunas, N. S. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Yuniningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 84–93. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93..>

..

